STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KONFLIK SOSIAL AKIBAT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE⁸²

**Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak
Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede**

Elmina Arofah

Nasrullah Nazsir

Pipin Hanapiah

e-mail: elmina.arofah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG) di antara Pemerintah dan OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi.

Kata-kunci: Konflik Sosial, Strategi Pemecahan Masalah, Penyelesaian Konflik Sosial.

82 Judul dan topik Skripsi atas nama Elmina Arofah pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

ABSTRACT

This research was done to provide an overview of the social conflict resolution process conducted by “SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede” in resolving social conflicts between Government and people affected by Waduk Jatigede development which caused by the presence of development of Waduk Jatigede. The source of the problems that trigger social conflict, are the issue of land acquisition compensation, relocation of residents, and relocation of cultural sites. The research used descriptive method with qualitative approach. The result indicates that SAMSAT resolve social conflicts by using the problem-solving strategy. SAMSAT doing the effort to create cooperation, a balance of power, and perceived common ground between Government and people affected by Waduk Jatigede development in resolving social conflict.

Keywords: Social Conflict, Problem-Solving Strategy, Social Conflict Resolution.

Pendahuluan

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang sedang mengalami proyek pembangunan infrastruktur. Kabupaten Sumedang menjadi tempat pembangunan Waduk Jatigede yang sudah berlangsung sangat lama kurang lebih 51 tahun. Proyek ini dimulai pada tahun 1963 dan hingga saat ini belum dapat difungsikan⁸³. Selama kurun waktu 51 tahun itu, tahap demi tahap pembangunan proyek seperti pembebasan lahan, pembuatan desain konstruksi dan pembangunan fisik bendungan telah dilaksanakan. Tahun 2013 direncanakan menjadi tahap terakhir dari pembangunan Waduk

Jatigede, yaitu tahapan pengairan. Namun tahap akhir dari pembangunan waduk ini justru terhambat, sebab muncul konflik antara Orang Terkena Dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede dengan Pemerintah Pusat, konflik tersebut muncul akibat adanya dampak sosial dari pembangunan Waduk Jatigede.

Pembangunan Waduk Jatigede direncanakan memiliki fungsi untuk mengairi areal irigasi seluas 90.000 hektar; menyediakan air bersih bagi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan kawasan di sekitarnya dengan kapasitas 3.500 liter/detik; serta menyuplai air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik sebesar 690 GWH/tahun dengan kapasitas terpasang 110 MW.⁸⁴ Sedangkan, untuk Kabupaten Sumedang sen-

83 Hasil wawancara dengan Penasihat SAMSAT Lapangan Jatigede tanggal 10 April 2014 di Kantor Sekretariat SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

84 <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/058394945/>

diri mendapat keuntungan saat pembangunan Waduk Jatigede selesai sebagai objek wisata.

Lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede didirikan di atas lahan seluas 4.973 hektar, yang meliputi 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cisit, meliputi Desa Cisit, Desa Cigintung, Desa Pajagan, dan Desa Situmekar; Kecamatan Darmaraja, meliputi Desa Cikeusi, Desa Tarunajaya, Desa Cipaku, Desa Pakualam, Desa Karangpakuan, Desa Jatibungur, Desa Neglasari, Desa Sukamenak, Desa Leuwihideung, Desa Darmaraja, Desa Sukaratu, dan Desa Cibogo; Kecamatan Wado, meliputi Desa Padajaya, Desa Cisurat, dan Desa Wado; Kecamatan Jatigede, meliputi Desa Cijeungjing, Desa Jemah, Desa Sukakersa, Desa Mekarasih, dan Desa Ciranggem; serta Kecamatan Jatinunggal, meliputi Desa Sirnasari dan Desa Pawenang⁸⁵.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Waduk Jatigede memicu munculnya konflik antara Orang Terkena Dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat. Konflik ini muncul karena adanya masalah sosial yang mengakibatkan perbedaan kepentingan antara OTD Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat

mengenai keinginan masing-masing pihak dalam pembangunan Waduk Jatigede. Pemerintah Pusat menginginkan pembangunan Waduk Jatigede dapat segera diselesaikan dan diiri sedangkan OTD Waduk Jatigede justru sebaliknya, mereka tidak mau pembangunan Waduk Jatigede dilanjutkan sebelum masalah-masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dapat diselesaikan.

Masalah sosial yang menjadi sumber utama munculnya konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede adalah masalah relokasi penduduk, relokasi situs budaya, dan masalah ganti rugi lahan dan bangunan⁸⁶.

Lamanya waktu pembangunan Waduk Jatigede juga diduga menjadi penyebab lain munculnya konflik. Selama 51 tahun proses pembangunan Waduk Jatigede, setidaknya sudah ada tiga dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede terutama bagi penyelesaian masalah ganti rugi pembebasan tanah dan relokasi penduduk. Ketiga dasar hukum tersebut adalah:

1. Tahun 1982-1986 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-

85 Hasil wawancara dengan Penasihat SAMSAT Lapangan Jatigede tanggal 10 April 2014 di Kantor Sekretariat SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

86 Hasil wawancara dengan Penasihat SAMSAT Lapangan Jatigede tanggal 10 April 2014 di Kantor Sekretariat SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah).
2. Tahun 1994-1997 (Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
 3. Tahun 2005-sekarang (Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum)⁸⁷.

Selain ketiga dasar hukum di atas, saat ini sudah keluar peraturan baru mengenai pembebasan tanah, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sehingga sampai dengan saat ini sudah ada lima dasar hukum.

Banyaknya pergantian dasar hukum dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan Waduk Jatigede ini menimbulkan perbedaan dalam proses penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede, terutama antara Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 dengan dasar hukum yang lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 dikatakan bahwa

pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru, sedangkan hal tersebut tidak tercantum dalam dasar hukum yang lainnya.

Proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan proyek Pemerintah Pusat, segala sesuatunya mulai dari tahap perencanaan sampai penanganan konflik yang muncul akibat pembangunan proyek menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, sebab dalam proyek pembangunan pusat, Pemerintah Pusatlah yang menjadi motor utamanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, Pemerintah Pusat cenderung mengabaikan konflik yang muncul dan tidak tanggap dalam menyelesaikannya.

Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan konflik pembangunan Waduk Jatigede ini, kemudian memunculkan tuntutan dari masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Maka, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik ini.

87 Hasil wawancara dengan Penasihat SAMSAT Lapangan Jatigede tanggal 10 April 2014 di Kantor Sekretariat SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

Meskipun konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya pembangunan proyek Pusat di Daerah, namun konflik yang terjadi merupakan konflik dengan skala Provinsi, sehingga dalam kasus ini Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan penanganan konflik. Hal ini sesuai dengan isi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam Pasal 24 Ayat (1 dan 2) tertulis bahwa:

“(1) Dalam status keadaan konflik skala Provinsi, gubernur bertanggung jawab atas penanganan konflik Provinsi.”

“(2) dalam penanganan konflik skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD Provinsi.”

Awalnya SAMSAT ini bernama Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede yang dibentuk pada tahun 2010. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 611.1/Kep.1086-Admerk/2012, SATGAS tersebut diubah menjadi SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. SAMSAT ini memiliki tugas untuk memperlancar dan memfasilitasi penyelesaian konflik pembangunan Waduk Jatigede. Fasilitasi yang dimaksud adalah SAMSAT melakukan

penghimpunan dan memfasilitasi aspirasi OTD Waduk Jatigede mengenai keinginan masyarakat dalam pembangunan fasilitas pemukiman pengganti, melaksanakan sosialisasi kepada OTD Waduk Jatigede mengenai relokasi penduduk sebagai upaya mengkoordinasikan masyarakat untuk mendukung pembangunan Waduk Jatigede, melaksanakan sosialisasi kepada OTD Waduk Jatigede mengenai pelaksanaan penanganan budaya, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum kepada OTD Waduk Jatigede, menginventarisasi permasalahan yang timbul akibat pembangunan Waduk Jatigede, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik Pembangunan Waduk Jatigede, SAMSAT melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut. Strategi *problem solving* (persuasif) dianggap sebagai strategi yang cocok untuk menyelesaikan konflik yang mengalami kemandekan. *Problem solving* digunakan untuk mendapatkan keluaran konflik yang adil, yakni menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, SAMSAT melakukan upaya agar masing-masing pihak yang berkonflik mau melakukan kerjasama. SAMSAT juga melakukan upaya untuk memecah kemandekan yang terjadi dengan cara menciptakan

keseimbangan kekuatan antara OTD Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat. Selain itu, SAMSAT juga melakukan usaha untuk membangun *Perceived Common Ground (PCG)* di antara Pemerintah Pusat dan OTD pembangunan Waduk Jatigede, yaitu kondisi dimana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki aspirasi yang tidak terlalu tinggi dan tidak kaku. Upaya ini dilakukan agar solusi yang integratif dapat dihasilkan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi SAMSAT dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di antara OTD Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat yang saat ini sedang mengalami kemandekan.

Tinjauan Pustaka

Konflik sosial dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, diartikan sebagai:

“perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih

yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Menurut Suparlan (2004), konflik terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jatidiri dan orang perorangan yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jatidiri orang perorangan tersebut diganti oleh jatidiri golongan atau kelompok.⁸⁸

Dalam bukunya, Bebbington (1997)⁸⁹, mengungkapkan bahwa konflik sosial dapat terjadi dalam tiga ruang kekuasaan, yakni kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial, dan sektor swasta. Hal ini juga sejalan dengan teori *good governance* yang menyatakan bahwa terdapat tiga ruang kekuasaan dalam sebuah negara, yakni kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

88 Dalam Tesis Radhitya Wicaksono dengan judul “Peranan Polri Dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok). Jakarta: 2011.

89 Dikutip dalam Jurnal Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006 “Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat) Oleh: Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr. Halaman 2.

TIGA RUANG KEKUASAAN BEBBINGTO

Tiga Ruang Kekuasaan Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan modifikasi dari *Bebbington, 1997*)

Pendapat Bebbington ini sesuai dengan pemikiran Ralf Dahrendorf⁹⁰ mengenai masyarakat apabila dilihat dari sudut pandang teori konflik. Dahrendorf bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggota masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Adanya dua kategori masyarakat ini, termasuk struktur dan hakikat kehidupan bersama yang ada di dalamnya mengakibatkan munculnya kepentingan-kepentingan yang berbeda dan berlawanan. Pada akhirnya perbedaan kepentingan yang terjadi sangat memungkinkan lahirnya kelompok-kelompok yang berbenturan dan menciptakan sebuah konflik sosial. Inti dari teori Dahrendorf sendiri adalah bahwa konflik atau pertentangan terjadi ketika terdapat perbedaan

pembagian kekuasaan dan wewenang dalam sebuah struktur sosial sehingga menciptakan apa yang disebut oleh Max Weber sebagai pertentangan kelas. Dari pendapat di atas maka kita dapat melihat konflik yang terjadi antara Pemerintah dan OTD Waduk Jatigede sebagai konflik sosial.

Ketika konflik yang terjadi masih dalam skala yang kecil, kemungkinan besar konflik tersebut masih dapat diselesaikan oleh para internal aktor yang terlibat konflik. Namun ketika konflik terjadi dalam skala besar, maka dibutuhkan campur tangan dari Negara dalam hal ini pemerintah untuk menyelesaikannya⁹¹.

Adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam upaya penyelesaian konflik, dapat didorong oleh tiga faktor⁹², yaitu: *responsibility*, *obligation*, dan *accountability*. *Responsibility*, adalah suatu keadaan dimana pemerintah melakukan perannya atas dasar tanggungjawab moral yang dimiliki. *Obligation*, adalah keadaan dimana pemerintah melakukan perannya karena adanya kewajiban yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan *accountability*, adalah keadaan dimana pemerintah bertindak ketika muncul tuntutan dari masyarakat.

90 Lihat dalam Veeger, 1985:214).

91 Lihat Rozi, 2006:2.

92 Lihat Spiro, 1969:14-20.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dibutuhkan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan⁹³.

Sedangkan startegi konflik sendiri merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengidentifikasi sumber konflik dan mencari solusinya. Strategi konflik ini pun bermacam jenisnya tergantung dari situasi konflik yang dihadapi dan akan diselesaikan. Pruitt dan Rubin⁹⁴ menyatakan terdapat lima strategi yang dapat digunakan untuk mengelola konflik, yaitu *Contending* (Bertanding), *Yielding* (Mengalah), *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), *Withdrawing* (Menarik Diri), *Inaction* (Diam).

Dari kelima strategi konflik di atas, *problem solving* merupakan strategi konflik yang dianggap paling cocok untuk menyelesaikan konflik yang mengalami kemandekan. Kemandekan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dimana masing-masing pihak yang terlibat konflik tetap memiliki aspirasi yang tinggi

sehingga solusi yang dikehendaki bersama sulit didapatkan. Secara singkat strategi *problem solving* dapat didefinisikan sebagai “segala macam usaha yang dilakukan untuk melokasikan suatu solusi bagi kontroversi yang terjadi, yang dapat diterima oleh semua pihak⁹⁵. Terlaksananya strategi *problem solving* dapat dilihat dari beberapa indikator. Dengan demikian, indikator dari terlaksananya strategi pemecahan masalah (*problem solving*) adalah terciptanya kerjasama antar-pihak yang berkonflik, terciptanya keseimbangan kekuatan, dan terciptanya *Perceived Common Ground* (PCG)⁹⁶.

Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin menyatakan bahwa strategi pemecahan masalah (*problem solving*) yang sukses dapat melahirkan tiga macam hasil, yaitu kompromi, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang, atau solusi integratif. Dari ketiga hasil strategi *problem solving* yang telah disebutkan, solusi integratif merupakan solusi yang dianggap paling dapat merekonsiliasikan (mengintegrasikan) kepentingan kedua belah pihak. Solusi integratif melahirkan hasil bersama tertinggi di antara ketiga macam kesepakatan. Solusi yang benar-benar integratif adalah solusi yang benar-

93 Lihat Wirawan, 2000:129.

94 Lihat Pruitt dan Rubin, 2004:57-59.

95 Ibid, 2004:311.

96 Ibid, 2004:295-297.

benar memuaskan kedua belah pihak, namun solusi integratif biasanya tidak sukses itu. Solusi integratif merekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara parsial, sehingga solusi yang didapat biasanya cukup membuat mereka merasa puas tetapi tidak sebahagia bila mereka mendapatkan semuanya. Solusi integratif dapat tercapai bila aspirasi masing-masing pihak tinggi, tekanan waktu rendah, ketakutan terhadap konflik rendah, dan pihak-pihak yang berkonflik tidak terlalu terobsesi oleh pentingnya keadilan⁹⁷.

Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin⁹⁸ mengidentifikasi lima macam solusi integratif, yaitu:

1. Memperbesar Kue (*Expanding the Pie*)

Solusi integratif ini dilakukan dengan menambah ketersediaan sumber daya. *Expanding the Pie* merupakan formula yang bermanfaat bila pihak-pihak yang berkonflik menganggap bahwa proposal masing-masing sebenarnya dapat diterima tetapi sengaja mereka tolak karena mempertimbangkan nilai kesempatan (*opportunity cost*). Informasi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan tentang tuntutan masing-masing pihak.

2. Kompensasi Nonspesifik

Dalam kompensasi nonspesifik, suatu pihak yang terlibat kontroversi mendapatkan yang diinginkannya, sementara pihak lain mendapatkan pembayaran-pengganti (*repayment*) dalam bentuk yang sama sekali tidak terkait dengan isu kontroversinya. Kompensasi disebut “nonspesifik” bila kompensasi itu tidak terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan pihak lain. Kompensasi biasanya datang dari pihak yang tuntutannya terpenuhi, dari pihak ketiga atau bahkan dari pihak yang diberi kompensasi. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang satu hal atau lebih yang dianggap berharga oleh pihak lain dan tentang seburuk apa rasa sakit yang dirasakan pihak lain bila ia harus membuat konsensi.

3. Balas Jasa (*Logrolling*)

Dalam *logrolling*, satu pihak menyerahkan isu-isu yang tingkat prioritasnya rendah kepada dirinya sendiri dan isu-isu yang tingkat prioritasnya tinggi kepada pihak lain. Sehingga, masing-masing mendapatkan sebagian tuntutannya yang dianggap paling penting bagi dirinya. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang prioritas masing-masing pihak

97 Ibid, 2004:315-321.

98 Ibid, 2004:321-334

atas berbagai isu, sehingga konsensi dapat disesuaikan.

4. Pengurangan Biaya (*Cost Cutting*)

Dalam *cost cutting*, suatu pihak mendapatkan apa yang diinginkannya sementara biaya (uang, pengorbanan, atau beban dengan berbagai bentuknya) yang harus dikeluarkan oleh pihak lain dikurangi atau ditiadakan. Hasilnya adalah keuntungan bersama yang tinggi, bukan karena suatu pihak telah mengubah posisinya, tetapi karena pihak lain berkurang bebannya. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang apa saja biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak lain.

5. Menjembatani (*Bridging*)

Dalam *bridging*, tidak satu pihak pun mendapatkan tuntutan aslinya, tetapi sebuah opsi baru dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan keinginan-keinginan terpentingnya yang melatarbelakangi tuntutan tersebut. *Bridging* biasanya muncul dari reformulasi isu yang dibuat berdasarkan analisis terhadap kepentingan yang mendasari isu tersebut. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang prioritas berbagai kepentingan kedua belah pihak dan prioritas atas masing-masing kepentingan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemecahan masalah (*problem solving*) yang dilakukan oleh SAMSAT dalam menyelesaikan konflik pembangunan Waduk Jatigede.

Metode dan Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk memahami lebih mendalam mengenai strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dengan cara membangun gambaran yang menyeluruh (holistik) yang bersumber dari keterangan-keterangan, tanggapan-tanggapan, dan informasi dari narasumber secara rinci dan dalam *setting* yang alamiah.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini dipilih agar penulis dapat mengamati dan sekaligus menggambarkan secara lebih khusus permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat menggambarkan secara jelas strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh SAMSAT.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku mengenai konflik sosial, manajemen konflik, *problem solving*, pemerintahan ataupun literatur lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan, konsep, dan teori penelitian. Selanjutnya adalah melalui teknik observasi, yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dengan berbagai cara, seperti mengikuti dan memantau perkembangan strategi pemecahan masalah dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh SAMSAT baik melalui media sosial maupun pengamatan langsung. Kemudian melalui teknik wawancara, yaitu peneliti menyusun sebuah pedoman wawancara yang kemudian diberikan kepada informan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede. Terakhir adalah melalui teknik dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti buku-buku, arsip, artikel, dasar hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede.

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*., yaitu didasarkan pada pertimbangan, bahwa informan-informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang strategi pemecahan masalah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua SAMSAT, Tim SAMSAT Lapangan, Penasehat SAMSAT Lapangan, Masyarakat OTD Waduk

Jatigede, Ketua LSM PERKOT DAM JATIBER (Perhimpunan Komunikasi Orang Terkena Dampak Waduk Jatigede Bersatu), dan Forum Kepala Desa setempat.

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti melakukan triangulasi sumber data kepada narasumber. Kemudian peneliti melakukan triangulasi teknik, yaitu data, fakta, dan informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber dicek, diricek, dan dikroscek melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi terakhir yang dilakukan adalah triangulasi waktu, peneliti melakukan pengecekan kembali data, fakta, dan informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum data-data, fakta-fakta, dan informasi-informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber kemudian dipilih hal-hal pokok yang fokus pada permasalahan

yang diteliti kemudian disusun dan dicari polanya. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data-data, fakta-fakta, dan informasi-informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat dan bagan, untuk memudahkan peneliti lebih memahami strategi pemecahan masalah yang dilakukan serta untuk merencanakan kerja selanjutnya. Terakhir adalah penarikan kesimpulan, kumpulan data, fakta dan informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang telah direduksi dan disajikan kemudian diambil kesimpulannya. Karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, maka kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara.

Hasil dan Pembahasan

Sebelumnya telah digambarkan bahwa konflik sosial antara OTD Pembangunan Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat muncul akibat adanya masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan Waduk Jatigede. Masalah utama yang menjadi penyebab konflik sosial ini adalah adanya masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan bangunan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya yang belum dapat terselesaikan.

Untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, Pemerintah

membentuk SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi (*accountability*). Namun selain untuk memenuhi tuntutan OTD Waduk Jatigede agar segera diselesaikannya konflik sosial yang terjadi, pembentukan SAMSAT ini juga dilakukan karena adanya kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (*obligation in goverment*).

Dalam upaya menyelesaikan konflik sosial yang terjadi karena adanya masalah ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan, SAMSAT melakukannya dengan cara merespon komplain masyarakat Jatigede terkait masalah ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan dengan melakukan pendataan ulang terhadap tanah-tanah yang terlewat dan belum dibebaskan yang kemudian dilakukan penyesuaian dan pengecekan dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T). Apabila diketahui ada tanah yang memang bermasalah, maka SAMSAT berkerjasama dengan yang anggotanya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengukuran ulang lahan dan bangunan tersebut, untuk kemudian akan diproses masalah pemberian ganti ruginya. Sementara untuk tanah-tanah yang telah mendapat ganti rugi namun ternyata meminta

ganti rugi ulang maka Pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi ulang, sebab tidak ada aturannya. Begitu pula dengan tanah-tanah yang menginginkan penyesuaian harga, SAMSAT belum dapat berbuat apa-apa sebab masih belum ada aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya adalah mengenai masalah relokasi penduduk, sering terjadinya pergantian aturan dalam pembangunan Waduk Jatigede pada akhirnya membuat SAMSAT harus membagi OTD pembangunan Waduk Jatigede kedalam dua kategori, yaitu Kategori-I merupakan masyarakat yang menerima pembebasan tanah tahun 1982-1986 yang berdasarkan aturan pada saat itu, Permendagri No.15 Tahun 1975 mendapatkan hak relokasi. Selanjutnya Kategori-II, yaitu masyarakat yang pembebasan tanahnya dilakukan berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Perpres 36 Tahun 2005 dan tidak mendapatkan hak relokasi, termasuk masyarakat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tetapi mendiami area waduk. SAMSAT menyelesaikan masalah ini dengan cara melakukan musyawarah dengan OTD Waduk Jatigede dan menampung aspirasi masyarakat terkait keinginan mereka dalam proses relokasi penduduk, sehingga SAMSAT tidak bertindak sendiri dalam menyelesaikan konflik, tetapi ia bekerjasama dengan memperhatikan aspirasi OTD.

Sampai dengan saat ini sebenarnya Pemerintah telah membebaskan lahan

di beberapa tempat untuk dijadikan tempat relokasi penduduk. Tempat tujuan relokasi penduduk ini pun disediakan berdasarkan keinginan masyarakat. Pembebasan lahan tersebut di antaranya dilakukan di daerah Pasir Padang seluas 43 Ha, daerah Conggeang seluas 30 Ha, dan daerah Ujung Jaya seluas 34 Ha. Telah dibangun pula rumah tipe 36 dengan tanah seluas 400 meter² untuk masyarakat yang terkena pembebasan tanah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 (Kategori-I). Sementara itu, untuk masyarakat yang pembebasan tanahnya dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Kategori-II), yang tidak memiliki hak atas relokasi tetapi menuntut untuk diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki hak atas relokasi, Pemerintah tidak dapat memberikan hak relokasi tersebut sebab akan berbenturan dengan aturan yang berlaku.

Namun demikian dalam menyikapi hal ini SAMSAT memberikan usulan untuk memberikan uang kerohiman atau santunan. Usulan ini tidak muncul begitu saja dari pihak SAMSAT, tetapi hal ini berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat yang menginginkan hak atas relokasi tersebut. Adanya usulan ini pun tidak

serta-merta disetujui oleh semua pihak, muncul pro dan kontra terhadap usulan tersebut terutama dari para Kepala Desa yang khawatir apabila uang santunan yang diberikan tidak digunakan dengan tepat oleh OTD Waduk Jatigede, sebab apabila melihat cara hidup masyarakatnya, dikhawatirkan uang santunan tersebut malah digunakan untuk membeli kebutuhan sekunder masyarakat, bukannya kebutuhan primer mereka seperti kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal yang baru. Begitupun dengan masyarakat yang kontra dengan usulan pemberian uang kerohiman ini, mereka khawatir apabila uang kerohiman atau santunan ini besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapat pemukiman atau rumah baru di daerah lain.

Selanjutnya adalah mengenai relokasi situs atau cagar budaya. Waduk Jatigede dibangun di atas lahan seluas 4.973 Ha yang meliputi 5 Kecamatan yang terdiri atas 30 Desa, yaitu 22 Desa yang akan tergenangi dan 18 Desa yang tidak tergenangi. Dari 30 Desa tersebut terdapat sebanyak 48 situs yang akan tergenangi dan memerlukan upaya penanganan. Situs-situs tersebut umumnya berupa makam dari tokoh-tokoh yang dikeramatkan. Berdasarkan data relokasi situs pada tahun 2014 yang didapat dari SAMSAT, sampai dengan saat ini diketahui bahwa dari 48 situs budaya yang ada di wilayah genangan Waduk Jatigede, sebanyak 32 situs telah selesai dipindahkan, 10 situs

sedang ditangani, dan 5 situs sedang dinegosiasikan.

Konflik sosial yang muncul akibat adanya relokasi situs atau cagar budaya ini pada awalnya bermula dari adanya penolakan masyarakat terutama para juru kunci situs terhadap relokasi situs dan cagar budaya. Masyarakat berpendapat bahwa apabila situs atau cagar budaya yang ada direlokasikan, maka akan mengurangi nilai historis dari situs atau cagar budaya tersebut, serta adanya anggapan masyarakat bahwa mereka menjadi dijauhkan dari leluhur dan sejarah asal mereka. Namun setelah dilakukan penghimpunan aspirasi masyarakat serta musyawarah antara masyarakat dan pemerintah yang difasilitasi oleh SAMSAT, didapatkan hasil bahwa Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban untuk melestarikan situs budaya akan memfasilitasi pembiayaan pemindahan serta perawatan situs bagi situs yang bersedia dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Walaupun terdapat banyak penolakan terhadap relokasi situs budaya terutama untuk situs yang berhubungan langsung dengan sejarah Kabupaten Sumedang, namun sampai dengan saat ini sudah banyak juga situs-situs dengan kelas yang biasa yang sudah berhasil direlokasikan.

Selain melakukan musyawarah, penghimpunan aspirasi, dan merespon tuntutan OTD seperti di atas, SAMSAT juga menjaga agar konflik yang terjadi

tidak semakin memanas dengan menjauhkan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik berjalan kearah konflik yang anarkis. SAMSAT tidak melakukan tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan. Sebab bercermin dari pengalaman di masa lalu (1982—1986) pada saat Pemerintah melakukan pembebasan tanah dengan cara kekerasan dan pemaksaan melalui intimidasi terhadap masyarakat, ternyata sampai dengan saat ini hasilnya adalah munculnya permasalahan yang berlarut-larut dan mengakibatkan munculnya konflik yang semakin bereskalasi dan memanas.

Adanya pembentukan Forum Kepala Desa (FKD) pun disambut dengan sangat baik oleh pihak SAMSAT. Sebab adanya FKD ternyata telah mampu meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat membuat konflik sosial yang terjadi semakin memanas dan berujung anarkis. Dengan adanya FKD, masyarakat menyampaikan tuntutan langsung kepada para Kepala Desa bersangkutan selaku aparatur Pemerintah, sebab FKD sendiri memang dibuat atas keinginan masyarakat dan sepersetujuan para Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah Forum yang dapat menghimpun aspirasi dan tuntutan masyarakat serta meminimalisir campur tangan LSM.

Selanjutnya SAMSAT pun melakukan sosialisasi-sosialisasi dan musyawarah terkait masalah pem-

bebasan tanah, relokasi penduduk, relokasi situs, serta sosialisasi terkait manfaat dan keuntungan pembangunan Waduk Jatigede bagi OTD. Sosialisasi yang dilakukan SAMSAT dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai peluang-peluang apa saja yang dapat dilakukan oleh OTD pembangunan Waduk Jatigede apabila waduk telah selesai digenangi dan setelah waduk menjadi objek wisata agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat dengan adanya Waduk ini.

Sosialisasi mengenai pembangunan Waduk Jatigede ini merupakan hal yang sangat penting, sebab apabila ditelaah lebih dalam, bahkan kita dapat melihat bahwa dalam penyelesaian konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede kurang ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang yang wilayahnya digunakan sebagai tempat dibangunnya Waduk Jatigede terlihat belum dapat menerima pembangunan Waduk Jatigede dengan baik. Seperti yang telah diketahui, meskipun Pembangunan Waduk Jatigede dilakukan di wilayah Kabupaten Sumedang, namun sebenarnya pembangunan Waduk ini memang tidak memberikan manfaat langsung bagi Kabupaten Sumedang, sebab Waduk Jatigede ini memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air serta listrik untuk

wilayah Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya.

Meskipun Waduk Jatigede tidak memberikan manfaat langsung bagi Kabupaten Sumedang, tetapi bukan berarti Kabupaten Sumedang ini dirugikan oleh adanya Pembangunan Waduk Jatigede. Justru akan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan adanya Waduk Jatigede ini. Salah satunya adalah peningkatan dalam bidang ekonomi melalui pariwisata, setelah waduk selesai diairi. Adanya pemanfaatan Waduk Jatigede sebagai objek wisata oleh Kabupaten Sumedang akan sejalan dengan misi kedua Kabupaten Sumedang yakni “Mewujudkan Per-ekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata, dan Industri”. Sehingga adanya manfaat Waduk Jatigede sebagai objek wisata ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Kabupaten Sumedang sebagai aset daerah Kabupaten Sumedang yang pengelolaannya melibatkan masyarakat Kabupaten Sumedang terutama masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Jatigede. Adanya pemahaman bahwa pembangunan Waduk Jatigede hanya akan merugikan Kabupaten Sumedang ini jugalah yang membuat kurang terbukanya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerima pembangunan Waduk Jatigede. Selain itu terlihat masih ada keraguan dan ketakutan dari pihak-pihak yang

terlibat dalam penyelesaian konflik. Hal ini kemudian berpengaruh pula pada proses penyelesaian konflik yang terjadi.

Sebagai penutup penulis melihat bahwa dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, SAMSAT menyelenggarakan musyawarah dan rapat-rapat dengan wakil OTD pembangunan Waduk Jatigede. Musyawarah dan rapat ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan keinginan OTD pembangunan Waduk Jatigede terkait masalah ganti rugi pembebasan tanah, relokasi penduduk, maupun relokasi situs. Apabila kita analisis lebih dalam, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh SAMSAT untuk melibatkan masyarakat dengan cara menampung aspirasi dan keinginan mereka terkait penyelesaian konflik sosial yang terjadi merupakan upaya penciptaan kerjasama, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk dapat menerima ‘lawan’ sebagai pasangan interdependen untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan pembangunan, permasalahan sosial budaya, dan permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari adanya pembangunan Waduk Jatigede.

Selanjutnya penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede juga dilakukan oleh SAMSAT dengan cara menjaga agar konflik yang terjadi tidak mengarah pada konflik yang anarkis dengan tidak melakukan tindakan pemaksaan, ancaman, dan kekerasan dalam penyelesaian konflik.

SAMSAT juga mendukung dan menyambut dengan baik adanya pembentukan FKD yang mampu meminimalisir keterlibatan LSM yang tidak bertanggung-jawab dalam konflik ini.

Apabila kita melakukan analisis lebih dalam, maka upaya-upaya yang dilakukan SAMSAT untuk menjaga agar konflik yang terjadi tidak mengarah pada konflik yang anarkis merupakan upaya penciptaan keseimbangan kekuatan, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan lagi masing-masing pihak yang terlibat konflik untuk memperlakukan pihak lain dengan kasar.

Penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede ini juga dilakukan oleh SAMSAT dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pembangunan Waduk Jatigede, baik itu sosialisasi mengenai pembebasan lahan, relokasi penduduk, relokasi situs, dan mengenai keuntungan pembangunan Waduk Jatigede bagi OTD pembangunan Waduk Jatigede. Apabila kita analisis lebih dalam, maka sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh SAMSAT merupakan upaya penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG), yaitu suatu upaya untuk menciptakan kondisi yang membuat aspirasi masing-masing pihak yang terlibat konflik tidak terlalu tinggi atau terlalu kaku, sehingga potensi untuk mengembangkan alternatif solusi yang integratif dapat tercipta.

Upaya-upaya penyelesaian konflik—dalam hal ini penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG)—di antara Pemerintah dan OTD Pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh SAMSAT di atas ternyata cukup efektif dalam menghasilkan penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede. Konflik sosial yang diakibatkan oleh masalah pembebasan lahan diselesaikan oleh SAMSAT dengan cara memberikan hal yang diinginkan oleh salah satu pihak. Sementara itu, pihak lain mendapatkan pembayaran-pengganti dalam bentuk yang tidak terkait dengan isu konfliknya. Dalam hal ini pihak Pemerintah mendapatkan tanah untuk pembangunan Waduk Jatigede, sementara pihak OTD pembangunan Waduk Jatigede diberikan uang ganti rugi terkait tanah-tanah yang terlewat dan belum dibebaskan, sebab mereka tidak mendapat manfaat langsung dari pembangunan Waduk. Apabila kita analisis lebih mendalam, maka penyelesaian konflik sosial akibat pembebasan lahan ini dilakukan melalui metode solusi integratif dengan cara memberikan kompensasi nonspesifik.

Sementara itu konflik sosial yang diakibatkan oleh relokasi penduduk, diselesaikan oleh SAMSAT dengan cara memberikan tuntutan yang dianggap paling penting oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, dalam hal ini OTD pembangunan Waduk Jatigede mendapatkan tempat dan

fasilitas untuk relokasi penduduk, sedangkan Pemerintah mendapatkan lahan untuk pembangunan waduk. Apabila kita analisis lebih dalam, maka penyelesaian konflik sosial akibat relokasi penduduk ini dilakukan melalui metode solusi integratif dalam bentuk balas jasa (*logrolling*).

Begitupun dengan konflik sosial yang diakibatkan oleh relokasi situs. SAMSAT menyelesaikannya dengan cara memberikan salah satu pihak yang terlibat konflik sesuai dengan apa yang diinginkan; sementara itu pihak lain dihilangkan bebannya—dalam hal ini Pemerintah mendapatkan lahan untuk pembangunan Waduk, sementara itu pihak OTD pembangunan Waduk Jatigede tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan situs sebab telah ditanggung oleh Pemerintah. Apabila kita analisis lebih dalam, maka penyelesaian konflik sosial akibat relokasi situs ini dilakukan dengan cara solusi integratif melalui pengurangan biaya.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa secara garis besar, SAMSAT melakukan upaya penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara OTD pembangunan Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*).

Simpulan

Dalam menyelesaikan konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede, SAMSAT melakukan pen-

ciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG) di antara Pemerintah dan OTD Pembangunan Waduk Jatigede. Penciptaan kerjasama dilakukan oleh SAMSAT dengan cara menjalin kedekatan antara Pemerintah dan OTD pembangunan Waduk Jatigede, melakukan musyawarah, serta melakukan rapat-rapat dengan wakil OTD pembangunan Waduk Jatigede, sehingga dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, SAMSAT tidak bertindak semauanya sendiri tetapi memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penciptaan keseimbangan kekuatan dilakukan oleh SAMSAT dengan cara menjaga agar konflik yang terjadi tidak berujung dengan anarkis, SAMSAT pun menyambut baik adanya pembentukan FKD karena dapat meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat membuat konflik semakin memanas dan berujung anarkis.

Terakhir adalah penciptaan *Perceived Common Ground* (PCG) oleh SAMSAT melalui sosialisasi terkait pembangunan Waduk Jatigede mulai dari sosialisasi mengenai pembebasan tanah dan tindak lanjutnya, sosialisasi mengenai relokasi penduduk, sosialisasi mengenai relokasi situs, dan sosialisasi tentang manfaat pembangunan Waduk Jatigede bagi OTD pembangunan Waduk Jatigede. Dengan demikian

kita dapat melihat bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial akibat pembangunan Waduk strategi pemecahan masalah.

Selain ketiga upaya yang telah dilakukan oleh SAMSAT, dalam penyelesaian konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede juga kurang ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten yang wilayahnya digunakan sebagai tempat dibangunnya Waduk Jatigede belum dapat secara terbuka untuk benar-benar menerima adanya pembangunan Waduk Jatigede sebagai pembangunan yang menguntungkan bagi Kabupaten Sumedang. Selain itu masih ada keraguan dan kurangnya inisiatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede dalam mencari solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi. Hal inilah yang juga menghambat segera terselesaikannya konflik pembangunan Waduk Jatigede.

Rekomendasi

Dalam menyelesaikan konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede, SAMSAT harus segera menindaklanjuti hasil-hasil musyawarah dan rapat yang dilakukan dengan OTD pembangunan Waduk Jatigede agar musyawarah dan rapat yang dilakukan tidak hanya terbatas

pada penghimpunan aspirasi saja dan penciptaan kerjasama yang dilakukan dapat bertahan lama dan berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dalam penciptaan keseimbangan kekuatan, SAMSAT harus segera menjalin kerjasama dengan FKD untuk lebih meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat menyebabkan konflik semakin memanas dan berujung anarkis.

Kemudian dalam penciptaan *Perceived Common Ground* pun SAMSAT harus melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pembangunan Waduk Jatigede langsung kepada OTD pembangunan Waduk Jatigede bukan hanya kepada wakil-wakilnya saja. Sebab, sampai dengan saat ini—terutama menjelang rencana penggenangan Waduk Jatigede secara resmi oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus ini—banyak sekali isu-isu yang tidak jelas yang beredar di masyarakat akibat informasi yang diterima oleh masyarakat tidak langsung diperoleh dari pihak SAMSAT.

Selanjutnya, harus ada sikap yang terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerima pembangunan Waduk Jatigede sebagai pembangunan yang akan menguntungkan bagi Kabupaten Sumedang. Keterbukaan untuk menerima pembangunan Waduk Jatigede ini harus dimulai dengan adanya kesadaran dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sumedang bahwa Pem-

bangunan Waduk Jatigede ini bukanlah sesuatu yang merugikan bagi Kabupaten Sumedang. Justru setelah Waduk Jatigede diairi, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sumedang harus cerdas dalam mengelola dan memanfaatkan Waduk Jatigede ini sebagai objek wisata yang dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Sumedang. Adanya Waduk Jatigede sebagai objek wisata, nantinya akan pula berimbas pada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang serta meningkatnya sumber penghidupan dan perekonomian masyarakat di sekitar Waduk Jatigede; dengan catatan bahwa pengelolaan Waduk Jatigede sebagai objek wisata harus melibatkan masyarakat Kabupaten Sumedang terutama masyarakat yang terkena dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede. Sehingga dengan fokus melihat pada keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pembangunan Waduk Jatigede ini, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang alih-alih merasa dirugikan tetapi justru harus dapat menjadikan Waduk Jatigede ini sebagai Aset Daerah yang sangat berharga. Di sinilah fungsi dari dilakukannya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Peneliti juga menyarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede ini tidak perlu merasa ragu atau takut untuk menggali lebih dalam lagi peraturan-

peraturan terkait penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Sebab, apabila dicermati dalam peraturan-peraturan terbaru mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu sudah diatur secara lebih rinci mengenai cara pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai masalah ini, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Terakhir peneliti juga merekomendasikan agar Pemerintah segera mengeluarkan Perpres mengenai penanganan masalah sosial Waduk Jatigede sebab saat ini masih ada masalah yang belum dapat diselesaikan oleh SAMSAT—yaitu terutama hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ganti rugi ulang terhadap tanah-tanah masyarakat yang sebenarnya sudah dibebaskan, tetapi pemiliknya saat ini merasa belum mendapatkan uang pembebasan tanah. Serta masalah penyesuaian harga atas tanah masyarakat yang telah dibebaskan, sebab masih ada masyarakat yang merasa bahwa harga yang dulu mereka terima untuk pembebasan tanah jauh di bawah harga pasaran tanah pada masa itu. Selain itu juga adanya masalah tuntutan dari masyarakat Kategori -II yang sebenarnya tidak memiliki hak atas relokasi tetapi menuntut untuk diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki hak atas relokasi—karena terhambat oleh tidak adanya peraturan.

Daftar Pustaka**Buku**

- Pruit, Dean G dan Jeffry Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozi, Syafuan dkk. 2006. *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spiro, Herbert J. 1969. *Responsibility In Government: Theory and Practice*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Dokumen

- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Jurnal Seminar PERAGI Pontianak “*Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat*.”
- Wicaksono, Radhitya. 2011. Tesis dengan judul “*Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)*”. Jakarta.

Peraturan Perundangan

- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 611.1/Kep.1086-Admerk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/KEP.269. ADMERK/2012 tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

Situs Internet

- <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/058394945/> diakses tanggal 3 Maret 2014.